

Berita Lingkungan Hidup

TANGGUL TERUS AMBLES DANA APBN TERKURAS

SIDOARJO -- Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menyatakan salah satu penyebab amblesnya tanggul luar sisi utara semburan lumpur Lapindo adalah hilangnya tanggul cincin semburan yang dikelola PT Lapindo Brantas. "Akibatnya, lumpur meluber terus ke sisi utara," kata Kepala Humas BPLS Achmad Zulkarnaen di Sidoarjo kemarin.

Dalam tiga bulan terakhir, tanggul luar sisi utara ambles beberapa kali. Terakhir terjadi pada Selasa lalu. Tanggul tersebut ambles sedalam 4 meter dari ketinggian semula 11 meter dengan panjang 210 meter dan lebar 35 meter. Awalnya lebar tanggul tersebut 36 meter. Namun, karena ambles, lebar tanggul kini tinggal semeter.

Tanggul yang ambles berada di sebelah selatan Dusun Polo Ginting, Kecamatan Gempol Asri, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, dengan jarak sekitar 400 meter. Kalau sampai air bercampur lumpur meluber, dusun tersebut akan terendam.

Awalnya, menurut Zulkarnaen, tanggul cincin berfungsi menghalau lumpur ke arah utara dan mengarahkannya ke sisi selatan agar mudah dialirkan ke Kali Porong. Tapi, sejak Oktober 2008, tanggul cincin sudah kehilangan fungsi karena Lapindo kehabisan dana untuk mengelolanya. Selanjutnya, pada Januari 2009, tanggul tersebut sudah hilang sehingga aliran lumpur ke sisi utara semakin deras.

"Hal itu menyebabkan debit lumpur di *pond* (kolam penampungan) lumpur meningkat dan mendesak tanggul sehingga ambles," kata Zulkarnaen. Untuk mengatasi laju lumpur yang meningkat setelah tanggul cincin hilang, ia melanjutkan, tidak ada cara bagi BPLS selain memperkuat tanggul. Tanah pun terus digelontorkan ke lokasi yang ambles.

Menurut Zulkarnaen, total anggaran yang dikeluarkan lembaganya untuk menangani masalah tanggul tersebut sudah mencapai lebih dari Rp 150 miliar. Dana itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007, 2008, serta 2009. "Kalau kondisinya terus ambles, dana bisa membengkak," katanya.

Anggota Dewan Pengarah BPLS, Jalaludin Alham, menambahkan, perbaikan tanggul tersebut akan semakin membebani APBN. Karena itu, dia berharap Lapindo turut membantu perbaikan tanggul. "Tidak bisa hanya menggunakan APBN, Lapindo juga harus bertanggung jawab," kata Alham, yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo.

Saat dimintai konfirmasi, Vice President PT Lapindo Brantas Yuniwati Teriyana menyatakan Lapindo tidak bisa meneruskan pengelolaan tanggul cincin. Sebab, mereka melihat tanggul cincin itu sudah tak ada fungsinya lagi. Sementara itu, anggaran untuk pengelolaan tanggul terlampau besar. "Itu rugi bagi Lapindo," ujarnya saat dihubungi *Tempo* kemarin.

"Dana tersebut lebih baik dialokasikan untuk memenuhi tanggung jawab sosial daripada untuk mengelola dampak fisik," Yuniwati menambahkan. Lantaran sudah ada BPLS, menurut dia, tanggung jawab penanganan semburan secara fisik diserahkan kepada badan tersebut, termasuk perbaikan dan penguatan tanggul. **MUHAMMAD TAUFIK | DIANING SARI | DWI WIYANA**